

IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DI INDONESIA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Usman¹, Wartoyo², Nur Haida³, Nining Wahyuningsih⁴

^{1,2,4}Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon

³Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

E-mail : usmancirebon@syekhnurjati.ac.id¹, wartoyo@syekhnurjati.ac.id²,
nurhaida26684@gmail.com³, niningwningsih@syekhnurjati.ac.id⁴

ABSTRAK

Indonesia berkomitmen untuk menyukseskan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi berkelanjutan yang juga merupakan bagian dari komitmen global. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam menerapkan program SDGs, dengan focus pada tujuan-tujuan terkait kesejahteraan. Selain itu, penulis juga akan mengeksplorasi relevansi penerapan SDGs di Indonesia dari perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review, yang merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menilai, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa aspek regulasi SDGs di Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dan relevansi dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai kekurangan dan ketidaksesuaian antara isu kesejahteraan dan tujuan SDGs, terutama dari perspektif ekonomi Islam. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kesenjangan sosial di Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir. Temuan ini menunjukkan perlunya perbaikan yang signifikan dalam pelaksanaan program SDGs untuk mencapai kesejahteraan yang lebih merata dan adil.

Kata Kunci: Kesejahteraan Sosial, SDG, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Abstract,

Indonesia is committed to the success of the Sustainable Development Goals (SDGs) as part of the sustainable economic development efforts that are also part of global commitments. This paper aims to analyze the extent of the government's success in implementing the SDGs program, focusing on goals related to welfare. In addition, the author will also explore the relevance of implementing the SDGs in Indonesia from an Islamic economic perspective. The research method used is Systematic Literature Review, which is a systematic and structured approach to assess, analyze, and synthesize the literature relevant to the research topic. The results of the study show that the regulatory aspects of SDGs in Indonesia have shown significant progress and relevance to the principles of Islamic economics. However, in practice, there are various shortcomings and mismatches between welfare issues and the goals of the SDGs, especially from an Islamic economic perspective. This has contributed to the increase in social inequality in Indonesia in the last ten years. These findings

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih indicate the need for significant improvements in the implementation of the SDGs program to achieve more equitable and just welfare.

Keywords: Social Welfare, SDG, Sustainable Development Goals

PENDAHULUAN

Berakhirnya Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015 meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah yang masih perlu diselesaikan (Aziz, et al., 2023). Sebagai tindak lanjut dan penyempurnaan dari MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs) diperkenalkan. SDGs melibatkan lebih banyak negara, baik maju maupun berkembang, dengan cakupan isu yang lebih luas. Tujuan utamanya adalah mencapai pembangunan berkelanjutan yang menjamin hak asasi manusia dan menjaga kualitas lingkungan untuk kehidupan yang lebih baik dari generasi ke generasi (Wahyuningsih, 2018). Implementasi SDGs membutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan individu untuk mengatasi tantangan yang saling terkait seperti pengentasan kemiskinan, akses pendidikan yang berkualitas, promosi kesetaraan gender, mitigasi perubahan iklim, promosi energi bersih, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini juga menekankan pentingnya kemitraan antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan di tingkat lokal dan global untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut secara efektif. Selain itu, juga untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi di dalam dan di antara negara-negara di dunia dengan mempromosikan kebijakan dan program inklusif yang tidak meninggalkan siapa pun. Sangat penting bagi semua negara untuk memprioritaskan upaya pelestarian lingkungan melalui praktik pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan generasi saat ini dan generasi yang akan datang.

Dalam konteks perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berkontribusi secara langsung pada pemerataan ekonomi (Aziz & Nur'aisah, 2021). Implementasi kebijakan yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seringkali malah menimbulkan kesenjangan sosial. Akibatnya, kesejahteraan hanya dirasakan oleh sebagian orang, sementara banyak yang masih terjebak dalam kemiskinan atau mengalami stagnasi dalam taraf hidup mereka (Aziz, 2021). Oleh karena itu, fokus pemerintah harus pada pembangunan berkelanjutan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan ekonomi, kesehatan, pendidikan berkualitas, dan jaminan sosial sebagai upaya menciptakan kesejahteraan sosial (Pamungkas, dkk., 2018).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga patut ditinjau lebih dalam. Apakah pertumbuhan tersebut telah berhasil menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat? Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kuartal II-2021 menunjukkan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,07 persen secara tahunan (year on year/yoy). Ini menunjukkan adanya kemajuan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Namun, peningkatan ini tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan masyarakat, yang masih mengalami penurunan (Bakhri, et al., 2023). Kesejahteraan masyarakat dapat dinilai dari lima aspek: kesehatan fisik, hubungan sosial, keluarga, finansial, dan pekerjaan (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Masih lemahnya kesejahteraan masyarakat menjadi target pemerintah dalam upaya meningkatkan taraf hidup yang layak melalui program pembangunan berkelanjutan yang adil. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak, termasuk pemikiran para ekonom, baik Islam maupun konvensional, juga berperan penting dalam mendukung keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan di Indonesia (Bakhri, et al., 2021).

Kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup dengan layak (Dharmayanti & Aziz, 2024). Pemenuhan kesejahteraan tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam perspektif ekonomi, kesejahteraan adalah tanggung jawab negara untuk memberikan kehidupan yang layak melalui kebijakan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan berkualitas, tenaga kerja, dan jaminan sosial (Dahlan, 2014).

Secara umum, pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Fatmasari, et al., 2022). Namun, pelaksanaannya seringkali mengabaikan aspek lingkungan, menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang semakin parah (Isbandi, 2005). Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurut Walter A. Friedlander dalam Whibawa dkk., kesejahteraan sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial untuk membantu individu atau kelompok mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal (Whibawa dkk., 2015).

Pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mannion menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang saling berkaitan di tingkat internasional dan global (Fatmawati, et al., 2022).

Terdapat perbedaan pandangan antara ilmu ekonomi konvensional dan ilmu ekonomi Islam mengenai pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Haerisma, et al., 2023). Ilmu ekonomi konvensional berfokus pada pertumbuhan tinggi tanpa memperhatikan distribusi output yang merata, yang sering kali berakhir pada kesejahteraan materi yang tidak merata. Sebaliknya, ilmu ekonomi Islam melihat pertumbuhan ekonomi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan materi manusia serta kepuasan batin, tanpa memandang ras, agama, atau bangsa (Siregar, 2018).

Setiap negara berusaha untuk maju dan berkembang untuk memperbaiki kondisi saat ini. Pembangunan adalah proses penting yang melibatkan perubahan dan kemajuan positif dari kondisi yang ada (Harjadi, et al., 2021). Sangat penting bagi pembangunan untuk mempertimbangkan faktor-faktor kunci yang mendukung setiap langkah dari proses tersebut (Rosana, 2018). Pembangunan mencakup

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih berbagai aspek seperti pertumbuhan ekonomi, kemajuan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Semua komponen ini sangat penting dalam memastikan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi negara mana pun. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap negara untuk memprioritaskan dan merencanakan dengan cermat inisiatif pembangunan mereka untuk mencapai kemajuan dan kemakmuran jangka panjang bagi rakyatnya.

Dalam penelitian ini, masalah yang dikaji adalah sejauh mana keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menerapkan SDGs, khususnya dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program SDGs dan relevansinya dengan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review dengan data sekunder dari sumber-sumber yang kredibel. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi SDGs di Indonesia pada aspek regulasi sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dalam 10 tahun terakhir (Wartoyo & Haida, 2023).

Ciri-ciri pembangunan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan sosial di Indonesia antara lain: Pertama, memberikan kemungkinan untuk bertahan hidup; Kedua, memanfaatkan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah lingkungan; Ketiga, memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lain untuk berkembang di semua wilayah; Keempat, meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam memasok sumber daya alam; dan Kelima, menggunakan prosedur yang mempertimbangkan kelestarian ekosistem. Penggunaan teknologi ramah lingkungan merupakan solusi yang tepat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program-program pembangunan yang dilaksanakan pada era SDGs perlu lebih memperhatikan kondisi lingkungan agar terhindar dari kerusakan dan pencemaran (Wartoyo, 2022).

TINJAUAN TEORITIK

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan tanpa melampaui ekosistem pendukung kehidupannya (Harjadi, et al, 2023). Masalah pembangunan berkelanjutan kini menjadi isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Menurut Emil Salim (1990), pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memenuhi kebutuhan, dan aspirasi manusia. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang.

Menurut KLH (1990), pembangunan (yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi) dapat diukur keberlanjutannya berdasarkan tiga kriteria: (1) tidak ada pemborosan penggunaan sumber daya alam atau depletion of natural resources, (2)

tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya, dan (3) kegiatannya harus dapat meningkatkan useable resource ataupun replaceable resource (Rahadian, 2016). Konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sendiri menitikberatkan pada tiga faktor utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keseimbangan dalam ketiga faktor tersebut diharapkan menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan lingkungan serta sosial di masyarakat.

Dalam Islam, konsep ini bukanlah hal baru. Jauh sebelum masyarakat global sadar akan isu sosial dan lingkungan dalam industrialisasi, Alquran sudah menyerukan kepada umat manusia untuk memanfaatkan kekayaan alam dengan bijak dan tidak merusaknya, sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 60. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil tiga poin penting: Pertama, ketika Allah menyuruh Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya sehingga memancarkan air daripadanya, ini menunjukkan bahwa kekayaan alam di bumi adalah pemberian dari Allah SWT yang diturunkan untuk dimanfaatkan dengan baik demi memenuhi kebutuhan manusia. Air merupakan simbol kekayaan alam yang vital dalam siklus kehidupan (Layaman, et al, 2021). Kedua, ketika Allah memancarkan dua belas mata air, yang sesuai dengan jumlah dua belas suku Bani Israil, ini menunjukkan bahwa Allah membagikan rezeki secara adil agar tidak terjadi perselisihan. Hal ini melambangkan faktor sosial dalam pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan menghindari ketimpangan. Kekayaan alam seharusnya dimanfaatkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya segelintir orang, karena ketidakadilan ini dapat menciptakan mudarat bagi banyak pihak. Ketiga, Allah menegaskan agar manusia menjaga lingkungan setelah diberikan karunia kekayaan alam dan tidak merusak bumi (Wiranto, 2018).

Materialisme mengajarkan bahwa kesejahteraan diukur dari pemilikan barang-barang mewah. Semakin banyak barang mewah yang dimiliki, semakin tinggi kesejahteraan seseorang. Logika masyarakat saat ini tentang kesejahteraan terkontruksi dengan pemikiran materialisme. Tidak masuk akal jika mengatakan bahwa orang yang tinggal di gubuk sederhana lebih sejahtera dibanding dengan orang yang tinggal di apartemen mewah, atau menganggap gila jika ada yang mengatakan bahwa orang yang hanya memiliki sepeda butut lebih sejahtera dibanding dengan orang yang memiliki BMW limited edition. Pemikiran materialistis ini telah menciptakan budaya konsumtif yang merusak keseimbangan lingkungan dan nilai-nilai sosial. Masyarakat cenderung menilai kesuksesan dan kebahagiaan berdasarkan kepemilikan fisik, bukan kualitas hidup seperti hubungan sosial yang baik, kesehatan mental, dan kontribusi positif terhadap komunitas. Dalam pandangan pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi, tetapi juga dari kualitas hidup secara keseluruhan, yang mencakup keseimbangan lingkungan dan sosial.

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih

Perubahan struktur sosial masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi yang dianut. Sistem ekonomi kapitalis yang memuja materi sebagai indikator kesejahteraan (economisentris) menyebabkan orang lebih dihargai jika memiliki ekonomi yang bagus. Masyarakat cenderung menghargai individu yang punya banyak uang, meskipun seorang koruptor, dibanding orang alim atau baik hati tapi miskin. Seiring dengan semangat umat Islam untuk menerapkan ajaran agamanya, muncul kajian tentang kesejahteraan dalam perekonomian berbasis syariah Islam. Paradigma ini menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tercapai bila seluruh aktivitas manusia berlandaskan syariah atau hukum-hukum Islam.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi Islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat (Jaelani, et al, 2021). Pembangunan tidak boleh hanya berkait dengan masalah dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi (transendental). Oleh karenanya, pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syari'ah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, qiyas, maupun ijhtihad para ulama fakih.

Pembangunan manusia secara utuh telah menjadi target pertama dalam ekonomi Islam. Dengan kata lain, pembangunan tidak sekedar membangun ekonomi rakyat, tetapi juga membangun sikap mentalnya (mental attitudes). Pembangunan juga tidak sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi juga kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani yang terbangun akan secara otomatis mendorong kemandirian, dan kesadaran yang tinggi bagi setiap orang untuk membangun dirinya, bangsa, dan umat manusia (Agung Eko Purwana, 2013). Dalam konteks Indonesia, upaya pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan dalam berbagai kebijakan dan program nasional. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan pendekatan pembangunan yang holistik dan inklusif, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.

Keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum, sangat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Dalam hal ini, pendidikan dan kesadaran lingkungan memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang peduli dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan sumber daya alam. Melalui kolaborasi dan komitmen bersama, diharapkan pembangunan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud, tidak hanya di atas kertas, tetapi juga dalam kenyataan sehari-hari. Dengan demikian, generasi mendatang dapat menikmati kehidupan yang lebih baik tanpa mengorbankan ekosistem yang mendukung kehidupan mereka. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan dan keputusan, baik di tingkat lokal maupun global.

Akhirnya, pembangunan berkelanjutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai individu yang peduli terhadap masa depan bumi. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan bagi semua makhluk hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR). Data dikumpulkan dari berbagai literatur yang mencakup teori-teori pembangunan berkelanjutan, pandangan Islam tentang pembangunan, serta regulasi dan program pemerintah terkait kesejahteraan sosial di Indonesia. Sumber data meliputi buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan laporan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian, kemudian diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali makna mendalam dari konsep-konsep yang diteliti serta memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupinya. *Systematic Literature Review* merupakan pendekatan sistematis dan terstruktur untuk menilai, menganalisis, dan menyintesis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam dan menghubungkannya dengan kebijakan serta program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis dengan menggunakan teknik analisis tematik. Informasi yang relevan dikategorikan berdasarkan tema-tema seperti konsep pembangunan berkelanjutan, pandangan Islam tentang pembangunan, serta regulasi dan kebijakan pemerintah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam dan implikasinya terhadap kebijakan kesejahteraan sosial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pembangunan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan

Konsep pembangunan berkelanjutan menempatkan isu yang menyesuaikan kebutuhan masa kini dengan juga mempersiapkan kebutuhan generasi yang akan datang (Emas, 2015). Albeit menambahkan bahwa terdapat hubungan antara pembangunan ekonomi dengan pelestarian lingkungan (Emas, 2015). Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan adalah menjaga stabilitas jangka panjang

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih yang menyelaraskan berbagai pendekatan pembangunan baik ekonomi, lingkungan, dan sosial. Seperti yang dicantumkan dalam Deklarasi Rio, setiap negara memiliki peran dalam isu pembangunan berkelanjutan, yang diperjelas dengan pembagian klasifikasi negara maju dan berkembang (Emas, 2015).

Kesejahteraan sosial, menurut UU No. 11 Tahun 2009, adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial terpenuhi, memungkinkan individu untuk hidup layak dan melaksanakan fungsi sosialnya. Saat ini, masih ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara, sehingga menghambat pelaksanaan fungsi sosial mereka. Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha terencana yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi sosial (Maspaitella et al., 2014).

Program pembangunan kesejahteraan sosial sudah memiliki indikator output dan outcome, tetapi pencapaiannya masih belum optimal. Masalah utama meliputi cakupan layanan yang luas dan variatif, kebutuhan waktu untuk perubahan perilaku, dan penilaian keberhasilan yang terlalu fokus pada output tahun anggaran (Nasir et al., 2022). Pemerintah telah meluncurkan berbagai program seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian nasional. Namun, tantangan besar seperti kesenjangan ekonomi, akses layanan sosial, dan partisipasi masyarakat masih perlu diatasi. Evaluasi dan penyesuaian program secara berkala serta kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan kesejahteraan sosial yang merata dan inklusif (Nuryana et al., 2019). Program-program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas individu dan komunitas dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang.

Namun, tantangan besar masih ada dalam mencapai kesejahteraan sosial yang merata. Faktor-faktor seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan akses terhadap layanan sosial, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan yang harus diatasi. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian program secara berkala diperlukan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan adil. Upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak harus terus didorong untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.

Implementasi dan Realisasi SDGs di Indonesia

Pembangunan sosial di Indonesia merupakan proses perubahan terencana dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jeffrey Sachs (2008) menyatakan bahwa pembangunan sosial harus mengintegrasikan kesejahteraan sosial dengan pembangunan ekonomi melalui kebijakan dan program

yang saling terkait. Pembangunan sosial memanfaatkan kebijakan ekonomi sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, memastikan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini berupaya menyelaraskan kebijakan sosial dan ekonomi guna memaksimalkan pendapatan, pembentukan aset, serta memastikan distribusi yang merata dan inklusif (Sachs, 2008).

Amartya Sen (1999) menekankan bahwa pembangunan sosial harus melibatkan lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, mencakup pengembangan kapasitas manusia dan pemberdayaan individu. Hal ini termasuk memastikan kebijakan sosial tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi tetapi juga memperhatikan kesejahteraan individu secara menyeluruh. Sen berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang memungkinkan individu mengakses peluang dan sumber daya adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan. Dengan pendekatan ini, pembangunan sosial menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada hasil, mengutamakan peningkatan kualitas hidup dan kesempatan setara bagi semua.

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mempertegas peran sektor kesejahteraan sosial dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan. Tantangan dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia mencakup beberapa isu serius, seperti garis kemiskinan yang masih sekitar 11% (Badan Pusat Statistik, 2023), malnutrisi kronis mencapai 37,3% (Kementerian Kesehatan, 2023), jumlah penderita HIV/AIDS yang mencapai 658 ribu jiwa (UNAIDS, 2023), rata-rata lama pendidikan yang hanya 7,5 tahun (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023), dan tingkat deforestasi yang berkisar antara 1-2% per tahun (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023).

Menurut laporan Bertelsmann Stiftung (2020), pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan upaya terkoordinasi dari berbagai pihak. Laporan tersebut menekankan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi antara kebijakan publik yang efektif, praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan komprehensif ini akan membantu Indonesia mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan secara terintegrasi, dan bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk perspektif lebih lanjut, Paul Collier (2007) membahas bagaimana negara-negara dengan kemiskinan ekstrem perlu melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sosial dan ekonomi mereka untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Collier mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi negara-negara miskin, termasuk konflik, sumber daya yang buruk, dan kebijakan yang tidak efektif, serta menyarankan pendekatan terintegrasi yang melibatkan baik reformasi kebijakan dan bantuan internasional.

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih

Meskipun Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs, seperti kekayaan sumber daya alam dan kekuatan ekonomi yang berkembang, pencapaian tersebut memerlukan pendekatan komprehensif. Menurut Paul Collier (2007), pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan pendekatan komprehensif. Tantangan utama meliputi kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, yang semuanya saling terkait dan memerlukan solusi yang terintegrasi. Untuk mencapai target-target SDGs, perlu adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi ini melibatkan penguatan kebijakan publik, penerapan praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pembangunan. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Indonesia dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan bergerak menuju pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam strategi dan implementasi kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan nyata dan kondisi lokal, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Wartoyo, 2022).

Relevansi Implementasi SDGs Perspektif Ekonomi Islam di Indonesia

UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan material dan spiritual warga negara untuk hidup layak dan melaksanakan fungsi sosial mereka. Namun, jaminan sosial seperti BPJS belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ideal jaminan sosial dalam Islam. Oleh karena itu, perlu adanya penyelenggaraan jaminan sosial yang berlandaskan prinsip syariah agar sesuai dengan ekonomi Islam (MUI, 2015).

Ekonomi syariah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia, termasuk melalui pengoptimalan lembaga-lembaga seperti BWI dan BAZNAS, yang mengelola dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*) (Aziz, 2019). Individu yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perilakunya, berbuat kebajikan, dan peduli pada masyarakat dapat dianggap sebagai contoh dari manajemen sosial yang ideal dalam kerangka ekonomi syariah (Hassan, 2020).

Dalam pengembangan ekonomi syariah, beberapa kendala yang dihadapi termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memadai dan implementasi syariah yang belum optimal dalam praktik ekonomi. Untuk meningkatkan kontribusi ekonomi syariah dalam kesejahteraan masyarakat, fokus harus lebih diarahkan pada kepentingan rakyat dan proyek-proyek yang berorientasi pada kesejahteraan umum (Yasin, et al., 2023).

Peran Ekonomi Syariah dalam Menyelesaikan Permasalahan Kesejahteraan Sosial di Indonesia

Hukum Islam telah menjadi living law dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke nusantara. Hal ini menjadikan hukum Islam sebagai landasan penting dalam kerangka pembentukan hukum nasional melalui proses legalisasi berbasis politik hukum tersebut. Berbagai undang-undang telah mengangkat hukum Islam menjadi hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Haji, hingga Undang-Undang Wakaf (Mukti Arto, 2010). Terbaru, Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 tentang Bank Syariah telah diundangkan, dan saat ini berbagai RUU terkait aktivitas ekonomi syariah, seperti RUU Sukuk, RUU Asuransi Syariah, dan RUU Pasar Modal Syariah, sedang dalam proses legislasi.

Namun, saat RUU Bank Syariah dibahas, dua partai politik, yaitu Partai Damai Sejahtera dan PDI Perjuangan di DPR, menolak keras untuk menyahkannya. Mereka beralasan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konsep kebhinekaan NKRI dan dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan serupa juga digunakan untuk menolak RUU Peradilan Agama pada tahun 1989. Sejarah menunjukkan bahwa kekhawatiran ini tidak terbukti. Para penentang seringkali lupa bahwa hukum Islam sudah berlaku di nusantara sebelum penjajahan Belanda memaksakan hukum kolonialnya, serta mengabaikan Pasal 29 UUD 1945 yang mendukung keberlakuan hukum agama, termasuk hukum Islam.

Kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah di Indonesia dapat dianalisis melalui empat aspek utama: keilmuan (peningkatan sumber daya manusia), institusi atau lembaga keuangan ekonomi syariah, regulasi, serta lembaga penyelesaian sengketa (litigasi atau non-litigasi). Meskipun terdapat kendala, permintaan akan jasa keuangan syariah berkembang lebih cepat daripada perkembangan pemikiran dan konsep mengenai ekonomi Islam. Sumber daya insani dalam bidang ini masih kurang memadai, dan lembaga keuangan syariah belum sepenuhnya ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ekonomi umat yang bebas dari praktik ribawi saat ini baru sebatas akad dan ikrar, tanpa menyentuh substansi kesejahteraan sosial. Transaksi yang terjadi sering kali hanya menghilangkan unsur riba dengan mendesain akad yang sah, tanpa menyentuh persoalan mendasar yang memerlukan peran aktif lembaga keuangan syariah. Pendekatan terhadap ekonomi syariah di Indonesia dilakukan dari dua kutub keilmuan, yaitu ilmu ekonomi dan ilmu hukum Islam, yang harus didekati secara integratif.

Buku-buku ekonomi Islam saat ini masih terbatas dalam menjelaskan pola-pola bisnis syariah yang tidak hanya sesuai prinsip syariah tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan masyarakat luas. Menurut kaidah ushul fiqh, transaksi dapat dilakukan dengan cara apa saja selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah Islam. Fatwa DSN MUI juga mengizinkan transaksi tersebut asalkan tidak

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih mengandung unsur riba, gharar, maisir, dan hal-hal lain yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Namun, dalam konteks peran ekonomi syariah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agenda pengembangan yang integratif belum tercapai. Dalam Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia, inisiatif dan target-target yang dicanangkan belum secara eksplisit menunjuk pada upaya kesejahteraan rakyat. Kontribusi ekonomi syariah terhadap pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam, seharusnya juga menjadi roh pengembangan ekonomi Islam dan lembaga keuangan syariah.

Konsep kerjasama dalam kebaikan dan takwa (*ta'awun fil birri wa taqwa*) merupakan prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Namun, praktik keuangan syariah saat ini, seperti bank, masih jauh dari konsep ini. Pembiayaan murabahah (jual-beli) masih mendominasi komposisi pembiayaan bank syariah, menunjukkan bahwa bank syariah belum berani berinvestasi pada pembiayaan untuk investasi riil yang memerlukan energi lebih dibandingkan pembiayaan jual-beli.

Kontribusi perbankan syariah dalam sektor ekonomi juga belum mencerminkan upaya pengembangan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor primer yang menguasai hajat lebih banyak anggota masyarakat belum sepenuhnya menjadi perhatian perbankan syariah dalam menyalurkan kredit. Meskipun perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya mungkin beralasan bahwa pragmatisme bisnis masih diperlukan untuk menjaga eksistensi usaha, strategi dan pendekatan yang lebih membela kepentingan rakyat seharusnya menjadi fokus dalam jangka panjang.

Pembangunan infrastruktur yang mendukung ekonomi syariah sangat krusial untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Ini meliputi pengembangan lembaga keuangan syariah yang lebih inklusif, aksesibilitas produk keuangan syariah di daerah-daerah terpencil, dan peningkatan kualitas layanan untuk memastikan bahwa produk dan layanan ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan investasi yang lebih besar dalam pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia untuk mengelola dan mengembangkan sektor ini.

Diversifikasi produk keuangan syariah juga harus dipertimbangkan untuk lebih menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain pembiayaan murabahah, pengembangan produk seperti sukuk sosial yang mendukung proyek-proyek kesejahteraan umum, dan pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis syariah dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Inovasi dalam produk-produk ini akan memberikan solusi finansial yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penting untuk menciptakan sinergi antara ekonomi syariah dan program-program kesejahteraan sosial yang ada. Integrasi ini bisa dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dengan program pemerintah yang

fokus pada kesejahteraan sosial. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat bekerja sama dalam mendanai proyek-proyek sosial seperti pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur dasar yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan dan dampak dari program-program ekonomi syariah sangat penting. Evaluasi ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa program tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengawasan yang ketat juga akan membantu memastikan bahwa program-program ini tidak hanya efektif dalam teori tetapi juga dalam praktik.

Partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ekonomi syariah juga penting untuk meningkatkan dampak sosialnya. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan melibatkan masyarakat, program-program tersebut akan lebih efektif dan berkelanjutan. Riset dan pengembangan di bidang ekonomi syariah perlu didorong untuk menemukan solusi inovatif yang dapat mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Akademisi, peneliti, dan praktisi harus bekerja sama untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan dampak dari ekonomi syariah dalam konteks kesejahteraan sosial.

Dengan pendekatan yang holistik dan berorientasi pada hasil, ekonomi syariah dapat berperan lebih signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Mengoptimalkan potensi ekonomi syariah akan memperkuat upaya pemerintah dalam mencapai target-target kesejahteraan sosial dan SDGs secara lebih inklusif dan berkelanjutan

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara yang proaktif dalam mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan SDGs, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat. Regulasi-regulasi tersebut, baik yang implisit maupun eksplisit, berfungsi sebagai landasan untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs yang telah disepakati. Namun, pada tataran implementasi, terdapat sejumlah kekurangan dan ketidaksesuaian antara tujuan SDGs dengan realitas yang dihadapi. Faktor-faktor seperti politik dan ekonomi memainkan peran besar dalam menghambat pelaksanaan yang efektif. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesejahteraan masyarakat Indonesia mencerminkan bahwa program SDGs belum sepenuhnya berhasil diimplementasikan. Terlepas dari upaya dan regulasi yang ada, tantangan struktural dan politik seringkali menghalangi pencapaian hasil yang optimal.

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih

Dalam perspektif ekonomi Islam, implementasi SDGs di Indonesia menunjukkan pemenuhan unsur masalah, terutama melalui peran lembaga keuangan syariah. Baik bank maupun lembaga keuangan syariah non-bank telah mengalami kemajuan signifikan dalam dekade terakhir, menyediakan alternatif pembiayaan yang lebih terjangkau untuk masyarakat golongan bawah. Meskipun demikian, masih banyak perbaikan yang diperlukan agar tujuan-tujuan SDGs, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai dengan lebih intensif. Untuk memaksimalkan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat di masa depan, diperlukan peningkatan dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program SDGs. Upaya ini harus melibatkan penguatan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Dengan strategi yang lebih terarah dan komprehensif, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang lebih berarti dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan tujuan SDGs.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, A. N., & Hardana, A. (2024). Determinants Of Murabaha Margin Income Of Islamic Commercial Banks In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 107-121.
- Aziz, A. (2019). *Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Aziz, A. (2021). Promising business opportunities in the industrial age 4.0 and the society era 5.0 in the new-normal period of the covid-19 pandemic. *Scholarly Journal of Psychology and Behavioral Sciences*.
- Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. *Journal of Research in Business and Management*.
- Aziz, A., Syam, R. M. A., Hasbi, M. Z. N., & Prabuwono, A. S. (2023). Hajj Funds Management Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah; A Proposal for Indonesian Context. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 18(2), 544-567.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Laporan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2021*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan tahunan statistik kemiskinan*. Jakarta: BPS
- Bakhri, S., Layaman, L., & Alfian, M. I. (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan Cirebon Pada Perlindungan Konsumen Financial Technology Lending. *J-ISCAN: Journal of Islamic Accounting Research*, 3(1), 1-22.
- Bertelsmann Stiftung. (2020). *SDG Index and Dashboards Report 2020*. Gütersloh: Bertelsmann Stiftung.
- Collier, P. (2007). *The Bottom Billion: Why the Poorest Countries are Failing and What Can Be Done About It*. New York: Oxford University Press.
- Dahlan, Ahmad. "Mengagas Negara Kesejahteraan." *el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*
- Dharmayanti, D. ., & Aziz, A. . (2024). Transaction Halal Supply Chain Management (HSCMT) in the Digital Economy Era An Opportunity and a Challenge In Indonesia . *Migration Letters*, 21(4), 1410–1419. Retrieved from <https://migrationletters.com/index.php/ml/article/view/8086>
- Emas, R. (2015). The concept of sustainable development: definition and defining principles. Brief for GSDR, 2015, 10-13140.
- Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). ERROR CORRECTION MODEL APPROACH AS A DETERMINANT OF STOCK PRICES. *TRIKONOMIKA*, 21(2), 84-91.

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

- Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. *American Journal of Current Education and Humanities*, 1(01), 44-63.
- Hardana, A. (2024). Analisis Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kemiskinan dan Belanja Modal Pemerintah Daerah, Penyerapan Tenaga Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 2(2), 59-68.
- Haerisma, A. S., Anwar, S., & Muslim, A. (2023). Development of Halal Tourism Destinations on Lombok Island in Six Features Perspective of Jasser Auda's Maqasid Syari'ah. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(2), 298-316.
- Harjadi, D., Arraniri, I., & Fatmasari, D. (2021). The role of atmosphere store and hedonic shopping motivation in impulsive buying behavior. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 14(2), 46-52.
- Harjadi, D., Fatmasari, D., & Hidayat, A. (2023). Consumer identification in cigarette industry: Brand authenticity, brand identification, brand experience, brand loyalty and brand love. *Uncertain Supply Chain Management*, 11(2), 481-488. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pertumbuhan-ekonomi-di-indonesia> (diakses pada Selasa, 22 Februari 2022)
- Hassan, A. (2020). *Manajemen Sosial dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Isbandi, Adi Rukmianto. 2005. Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekejaan Islamica 10.1 (2013).
- Jaelani, A., Firdaus, S., Sukardi, D., Bakhri, S., & Muamar, A. (2021). Smart city and Halal tourism during the Covid-19 pandemic in Indonesia. *Rosa dos Ventos*, 13(4), 1-30.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Aspek Penilaian Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
- Kementerian Kesehatan. (2023). *Laporan status gizi masyarakat Indonesia*. Jakarta: Kemenkes.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Statistik pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan tahunan deforestasi Indonesia*. Jakarta: KLHK.
- Layaman, L., Harahap, P., Djastuti, I., Jaelani, A., & Djuwita, D. (2021). The mediating effect of proactive knowledge sharing among transformational leadership, cohesion, and learning goal orientation on employee performance. *Business: Theory and Practice*, 22(2), 470-481.

- Lubis, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(2), 180-206.
- Marito, N., Nofinawati, N., & Hardana, A. (2021). Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja PT. Bank Muamalat Indonesia. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 190-209.
- Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(2), 157-164.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pengeluaran pendidikan, Dan Realisasi Pengeluaran kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pandangan Islam Di Provinsi Sumatera Utara. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 6(1), 130-144.
- Muhammad Wandisyah R Hutagalung, M. E. (2022). *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Merdeka Kreasi Group.
- MUI, Hasil Ijtima Ulama V Majelis Ulama Indonesia Tahun 2015, di Tegal (Jakarta: MUI, 2015)
- MUI. (2015). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Jaminan Sosial dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Mukti Arto, 2010. *Praktek Perkara Perdata Di Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Cet .I.,
- Nasir, A., Busthomi, A. O., & Rismaya, E. (2022). Shariah Tourism Based on Local Wisdom: Religious, Income, Motivation, Demand and Value of Willingness to Pay (WTP). *International Journal Of Social Science And Human Research*, 5(08), 3811-3816.
- Nuryana, Mu'man, dkk, 2019. *Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial Indonesia*
P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Pamungkas, Alim Harun, dkk. "Peran PKBM dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Sesuai Target SDGs." *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 6.3 (2018): 303-309.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1).
- Rahadian, A. H. (2016, February). Strategi pembangunan berkelanjutan. In *Prosiding Seminar STIAMI* (Vol. 3, No. 1, pp. 46-56).

Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam

- Usman, Wartoyo, Nur Haida, Nining Wahyuningsih
Rosana, M. (2018). Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 5(1), 55-67.
- Salim, E. (1990). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia.
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Oxford University Press
- Siregar, P. Pardomuan. "Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan dalam Perspektif Islam." *Jurnal Bisnis Net* 1.1 (2018): 2021-3982.
- UNAIDS. (2023). *Global AIDS update 2023*. Geneva: UNAIDS.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan
- Wahyuningsih, W. (2018). Millenium Development Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 11(3), 390-399.
- Wartoyo. (2022). Kontekstualisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Ekonomi Islam. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 10 (2), 200–216. <https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7056>
- Wartoyo, W., & Haida, N. (2023). The Actualization of Sustainable Development Goals (SDGs) In Indonesia Economic Growth an Islamic Economic Perspective. *IQTISHADUNA*, 14(1), 107-124.
- Wibhawa, Budhi dkk. 2015. *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung. Unpad Press.
- Wiranto, A. (2018). *Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Alquran*.
- Yang, X., & Sachs, J. D. (2008). *Economic development and the division of labor*. John Wiley & Sons.
- Yasin, A. A., Salikin, A. D., Jaelani, A., & Setyawan, E. (2023). Sustainability Of Muslim Family Livelihoods In The Perspective Of Sustainable Development Goals. *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6).



Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman

Volume 11 Nomor 1 Ed. Januari – Juni 2024: hal. 108-107

p-ISSN: 2356-4628 e-ISSN : 2579-8650